

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI DI
INDONESIA: PENERAPAN TEORI KONSTITUSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Ariffudin Nur Fadly Rosyid¹, Falah Al Ghozali²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: afadly956@gmail.com

ABSTRAK

Penanganan perkara konstitusi di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi dengan memutuskan perkara yang berhubungan dengan hak konstitusional warga negara, uji materi terhadap undang-undang, dan sengketa lembaga negara. Penerapan teori konstitusi dalam penanganan perkara di MK berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan MK dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi konstitusi, pandangan ahli hukum, dinamika sosial-politik, serta tekanan eksternal dari masyarakat dan lembaga negara lainnya. Selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam mendukung penegakan konstitusi dengan meningkatkan kesadaran hukum, berpartisipasi dalam proses hukum, dan mengawasi kebijakan yang berpotensi melanggar konstitusi. Dengan demikian, penegakan konstitusi tidak hanya menjadi tugas MK, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga negara dan masyarakat, guna menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penanganan perkara konstitusi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan MK, serta peran masyarakat dalam mendukung penegakan konstitusi di Indonesia.

Kata Kunci: Penanganan Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Teori Konstitusi

ABSTRACT

The handling of constitutional cases in Indonesia has an important role in ensuring that state policies are in accordance with the values contained in the 1945 Constitution (UUD 1945). The Constitutional Court (MK) functions as a guardian of the constitution by deciding cases related to the constitutional rights of citizens, judicial review of laws, and disputes between state institutions. The application of constitutional theory in handling cases at the MK is based on basic principles such as the supremacy of law, social justice, and protection of human rights. The MK's decisions are influenced by various factors, including constitutional interpretation, the views of legal experts, socio-political dynamics, and external pressure from the community and other state institutions. In addition, the community plays an important role in supporting the enforcement of the constitution by increasing legal awareness, participating in the legal process, and monitoring policies that have the potential to violate the constitution. Thus, the enforcement of the constitution is not only the task of the MK, but also a shared responsibility between state institutions and the community, in order to create a just and democratic legal system. This study aims to describe the process of handling constitutional cases, the factors that influence the MK's decisions, and the role of the community in supporting the enforcement of the constitution in Indonesia.

Keywords: Handling of Constitutional Cases, Constitutional Court, Constitutional Theory

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.844

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penanganan perkara konstitusi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, hal ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi negara menjadi dasar utama bagi segala kebijakan dan hukum yang berlaku, sehingga setiap perselisihan yang menyangkut penerapan atau interpretasi konstitusi harus ditangani dengan cermat dan bijaksana. Peran lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara konstitusi sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip demokrasi dan keadilan (Mastur and Winandi 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menangani perkara konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sengketa hasil pemilu, serta hak konstitusional individu yang dilanggar oleh tindakan negara. Keberadaan MK sebagai penjaga konstitusi ini sangat penting untuk menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh negara tetap berada dalam koridor hukum yang sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, penanganan perkara konstitusi juga mencakup pemahaman yang mendalam terhadap hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam beberapa kasus, sengketa konstitusional dapat melibatkan kelompok atau individu yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh kebijakan pemerintah atau oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanganan perkara konstitusi bukan hanya soal memutuskan perkara hukum, tetapi juga soal menjaga keadilan dan hak asasi manusia (Arifa 2024).

Proses penanganan perkara konstitusi memerlukan ketelitian dan kewaspadaan yang tinggi, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, selain lembaga MK, pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara konstitusi seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan konstitusional. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya peran konstitusi dalam kehidupan bernegara agar dapat ikut serta dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, penanganan perkara konstitusi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga menjadi bagian dari usaha bersama untuk menjaga keutuhan negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, peran setiap elemen negara dan masyarakat sangat menentukan kualitas penegakan hukum serta pemenuhan hak konstitusional bagi seluruh warga negara (Wohon 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini adalah pendekatan kualitatif yang mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dan terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merangkum pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya mengenai topik yang dibahas, dengan fokus pada teori-teori, konsep-konsep, serta temuan-temuan yang telah dipublikasikan oleh para ahli. Melalui analisis kritis terhadap berbagai referensi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi gap pengetahuan yang ada dan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Penerapan Teori Konstitusi dalam Penanganan Perkara yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Penerapan teori konstitusi dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dihasilkan oleh negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia selaras dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dalam penanganan perkara konstitusi, MK menggunakan pendekatan teori konstitusi yang bersumber pada nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori konstitusi yang diterapkan oleh MK merujuk pada prinsip-prinsip dasar konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945, yang mencakup pemisahan kekuasaan, perlindungan hak konstitusional, serta checks and balances antara lembaga negara. Dalam proses penanganan perkara, MK sering kali merujuk pada teori-teori konstitusi yang membahas hubungan antara negara dan individu, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh negara agar tidak melanggar hak-hak warga negara. Penerapan teori konstitusi ini menjadi dasar dalam memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum (Zainal, Rahman, and Djanggih 2024).

Penerapan teori konstitusi juga mencakup aspek interpretasi konstitusi. Mengingat bahwa konstitusi bersifat fleksibel dan dapat mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika zaman, MK berperan dalam menafsirkan dan memberikan makna terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini seringkali melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam teks konstitusi, serta upaya untuk menyesuaikan interpretasi tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan negara pada masa tertentu. Selain itu, penerapan teori konstitusi juga terlihat pada penerapan prinsip keadilan sosial. MK tidak hanya memeriksa apakah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan teks UUD 1945, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Misalnya, dalam beberapa perkara, MK memperhatikan bagaimana kebijakan atau undang-undang tertentu dapat mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Ini menunjukkan bahwa penerapan teori konstitusi di MK tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat (Nugraha 2023).

Terakhir, penerapan teori konstitusi dalam penanganan perkara di MK juga mencakup aspek pluralisme. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya. MK berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kelompok minoritas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keberagaman. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan teori konstitusi yang inklusif dalam proses penanganan perkara konstitusi, yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum (Rikardo, Ikhwan, and Larasati 2023).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Perkara yang Berkaitan dengan Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, dan moral. Faktor pertama yang paling mendasar adalah teks dan interpretasi konstitusi itu sendiri. MK berpedoman pada UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Namun, dalam banyak kasus, teks konstitusi tidak selalu memberikan jawaban yang jelas atau pasti

terhadap setiap persoalan yang diajukan. Oleh karena itu, MK perlu menginterpretasi teks tersebut sesuai dengan konteks yang ada. Faktor kedua adalah pendapat hukum dari para ahli atau pakar konstitusi yang dihadirkan dalam proses persidangan. Dalam beberapa perkara konstitusi, MK memanfaatkan pendapat dari ahli hukum atau akademisi untuk membantu memahami lebih dalam mengenai makna dan dampak dari suatu norma dalam konstitusi. Pendapat tersebut memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pengambilan keputusan, sehingga MK dapat lebih objektif dalam menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan bertentangan dengan konstitusi (Zainal, Rahman, and Djanggih 2024).

Faktor ketiga adalah dinamika sosial dan politik yang sedang terjadi di masyarakat. Keputusan MK sering kali dipengaruhi oleh situasi sosial-politik yang sedang berkembang. Misalnya, dalam perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat, MK harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil terhadap berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, kondisi politik, seperti pemilu atau pergeseran kekuasaan, dapat mempengaruhi cara pandang MK dalam memutuskan perkara, meskipun seharusnya keputusan MK tetap didasarkan pada hukum dan konstitusi. Faktor keempat adalah tekanan dari pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah, legislatif, maupun masyarakat. Meskipun MK berfungsi sebagai lembaga yang independen, terkadang terdapat tekanan dari pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi keputusan MK. Namun, MK diharapkan dapat bertindak secara objektif dan bebas dari intervensi eksternal untuk menjaga kredibilitas dan integritasnya sebagai penjaga konstitusi. Tekanan tersebut bisa datang dalam bentuk opini publik, kampanye politik, atau bahkan intervensi dari lembaga negara lainnya (Raihan and Nasution 2022).

Faktor kelima adalah nilai-nilai keadilan dan moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Selain mengacu pada teks konstitusi, MK juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan dalam keputusan yang diambil. Misalnya, dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau kebebasan individu, MK tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila. Ini menunjukkan bahwa keputusan MK sering kali mencerminkan keseimbangan antara hukum dan etika sosial yang ada di masyarakat (Reinenda 2021).

Peran Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Konstitusi melalui Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penegakan konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan perkara konstitusi. Salah satu bentuk dukungan masyarakat adalah partisipasi aktif dalam proses hukum yang melibatkan konstitusi, seperti melalui penyampaian gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika mereka merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya perlindungan konstitusional, serta mendorong peran MK dalam menjaga hak-hak dasar warga negara. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Kritik sosial ini menjadi sarana bagi lembaga negara, termasuk MK, untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka juga memacu lembaga-lembaga negara untuk bekerja lebih baik dan mengedepankan prinsip keadilan (Kansil and Nuzan 2024).

Peran masyarakat juga terlihat dalam pendidikan hukum dan penyuluhan mengenai pentingnya konstitusi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi akan

lebih peka terhadap adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dengan adanya program-program pendidikan hukum, masyarakat dapat memahami hak-hak konstitusional mereka, cara-cara untuk mengajukan gugatan, serta prosedur hukum yang ada. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan transparan. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan konstitusi. Media dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dengan adanya media yang bebas dan independen, masyarakat dapat memperoleh informasi yang objektif mengenai keputusan-keputusan MK dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Reinenda 2021).

Terakhir, masyarakat juga dapat mendukung penegakan konstitusi melalui aksi-aksi sosial yang mendorong penghormatan terhadap hak-hak konstitusional. Aksi ini bisa berupa demonstrasi damai, petisi, atau kampanye yang menuntut perlindungan hak-hak dasar. Masyarakat yang aktif dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya turut berperan dalam memperkuat supremasi hukum dan konstitusi, serta memastikan bahwa negara selalu berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (Chofifi and Kusdarini 2024).

PENUTUP

Penanganan perkara konstitusi di Indonesia memerlukan peran aktif berbagai pihak, terutama Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga kesesuaian kebijakan dengan UUD 1945. Penerapan teori konstitusi dalam setiap perkara yang diajukan harus melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan yang diambil oleh MK dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi konstitusi, pendapat ahli, dinamika sosial-politik, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Masyarakat, sebagai bagian dari sistem hukum, juga berperan penting dalam mendukung penegakan konstitusi dengan meningkatkan kesadaran hukum, mengawasi kebijakan negara, serta berpartisipasi dalam proses hukum yang melibatkan hak konstitusional. Sebagai penjaga konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi dan masyarakat dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional sangat menentukan keberlanjutan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, S A. 2024. "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim: Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman Dari Ketua Mahkamah Konstitusi." https://www.researchgate.net/profile/Shabrina-Andri-Arifa/publication/383745062_Pendekatan_Prof_Jimly_Asshiddiqie_Terhadap_Kode_Etik_Profesi_Hakim_Studi_Kasus_Pemberhentian_Anwar_Usman_dari_Ketua_Mahkamah_Konstitusi/links/66d92754f84dd1716c96f06e/Pendekatan-Prof-Jimly-Asshiddiqie-Terhadap-Kode-Etik-Profesi-Hakim-Studi-Kasus-Pemberhentian-Anwar-Usman-dari-Ketua-Mahkamah-Konstitusi.pdf.
- Chofifi, N A, and E Kusdarini. 2024. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/34651>.
- Kansil, C S T, and N D Nuzan. 2024. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024." *UNES Law Review*. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2038>.
- Mastur, M, and W Winandi. 2022. "Kewenangan PPPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana

- Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Keadilan*.
<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/6332>.
- Nugraha, S N. 2023. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/661>.
- Raihan, M, and A I Nasution. 2022. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." *DIVERSI: Jurnal Hukum*.
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/3024>.
- Reinenda, V. 2021. "Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*.
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/download/247/177>.
- Rikardo, O, V N Ikhwan, and F Larasati. 2023. "Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak." *Jurnal Hukum Sasana*. <https://www.academia.edu/download/104939363/1433.pdf>.
- Wohon, D I. 2022. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020." *Lex Crimen*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38412>.
- Zainal, A Z, S Rahman, and H Djanggih. 2024. "Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Penanganan Perkara." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1919>.